



# Khawatir Dampak Lingkungan

## Warga Tolak Keberadaan SPBU

**JOGIA** - Sosialisasi aktivitas pembangunan di Kota Jogja kembali menjadi persoalan. Terbaru, rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Ipda Tut Harsono Jogja.

Meski Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja mengklaim semua persyaratan izin membangun bangunan (IMB) sudah terpenuhi, tapi kenyataannya ada warga yang masih menolak.

Pembangunan SPBU tersebut ditolak oleh warga RT 22 RW 07 Balirejo Muja-Muju, Umbulharjo, Jogja. Sekitar 30 warga RT 22, yang lokasinya di belakang langsung lokasi rencana SPBU kompak menolak dengan memasang spanduk penolakan di beberapa lokasi di sekitar pembangunan SPBU. "Alasan kami terkait polusi udara, suara, apalagi tangki yang dipasang dekat dengan perumahan," ujar juru bicara RT 22 Agung Arief ketika dikonfirmasi kemarin (24/7). Alasan lain yang dikemukakan warga terkait dengan kesehatan. Agung mengatakan, kekhawatiran warga terkait dampak dari bahan bakar yang menguap, yang akan dihirup oleh warga. Penolakan warga RT 22 sudah



**KEBERATAN:** Pesepeda melintas di dekat spanduk berisi penolakan warga Kampung Balirejo terhadap pembangunan SPBU, Senin (24/7).

pernah disampaikan saat sosialisasi pertama yang digelar pada 2014 lalu. Menurut dia, saat itu hanya ketua RW 07 dan RT di sekitarnya yang diundang dan saat itu pula RT 22 menyatakan menolak. "Saat itu resmi kami ajukan surat penolakan, awalnya dulu 23 warga, terakhir 30 warga semuanya RT 22," tegasnya.

Penolakan tidak hanya disampaikan pada Pemkot Jogja saja. Agung mengaku, pada 2015 juga sudah melapor persoalan tersebut ke Di-

rektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIJ. Bahkan Agung mengklaim sudah ada tindak lanjut dari Polda DIJ dengan meminta Pemkot Jogja untuk membatalkan IMB yang dikeluarkan. "Saya tidak tahu kok sekarang muncul lagi, sudah kami laporkan ke Polda DIJ lagi," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMP Kota Jogja Heri Karyawan mengaku, semua persyaratan pengajuan IMB, baik secara administrasi, mulai dari sertifikat,

kajian lingkungan, Amdal lain, maupun secara teknis seperti *site plan* sudah terpenuhi.

DPMP Kota Jogja sendiri hanya mengeluarkan IMB, sedang izin SPBU ada di pusat. Heri mengatakan, sebelum IMB didaftarkan, sebelumnya harus dilakukan kajian lingkungan serta sosialisasi ke warga. "Memang ada warga yang menolak, tapi mereka terdampak jauh, yang persil bersinggungan langsung semua sudah tanda tangan," jelasnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Muja-Muju			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005